

BAB V

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

5.1 Standarisasi Kompetensi Para Lulusan

Kualitas para lulusan di tentukan oleh kualitas dalam pembelajaran, begitupun sebaliknya kualitas pembelajaran di tentukan oleh input, proses serta output sistem yang ada. Kualitas pembelajaran salah satu nya dapat di lihat dari kualitas para lulusan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan adanya standar kualitas para lulusan termaksud sekolah kejuruan SMK. Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 35 dikatakan bahwa standar kompetensi para lulusan merupakan kualifikasi kemampuan dari para lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik yang harus dipenuhi. Dalam rangka menjalankan undang-undang kementerian pendidikan dan kebudayaan menerbitkan peraturan SKL yang terdapat dalam undang-undang Nomor 54 Tahun 2013 dan Nomor 20 Tahun 2016. Pemenuhan standar kompetensi lulusan (SKL) pada pendidikan merupakan proses berdasarkan kondisi ideal mengenai pembelajaran di SMK yang didasarkan pada Peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Standar kompetensi lulusan (SKL) pada pendidikan di SMK merupakan kriteria mengenai kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan dapat dikatakan sebagai profil kompetensi lulusan yang akan di capai oleh peserta didik setelah mempelajari semua mata pelajaran yang diberikan namun tetap sesuai dengan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, Standar kompetensi lulusan ini juga merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti (KI) kemudian dijabarkan ke dalam kompetensi dasar (KD).

Nafa Diantika Destiari, 2021

**IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019**

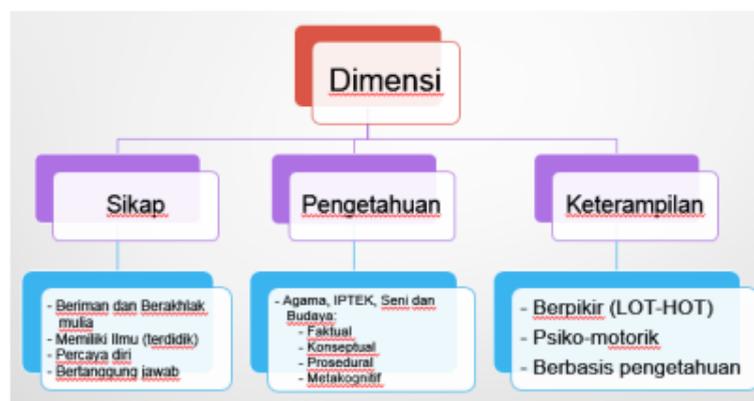
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- **Tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan serta standar biaya.
- **Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di jenjang pendidikan SMK.
- **Kaitan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Hasil Belajar** berdasarkan hasil selama berjalannya pendidikan SMK dapat diketahui kompetensi peserta didik yang telah dikuasai peserta didik. Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan setelah menempuh pembelajaran tersebut dapat dibilang Standar Kompetensi Lulusan. Hasil belajar dapat dirumuskan kedalam 3 kelompok, yaitu:

A. Ranah Taksonomi

Dimana dalam ranah tersebut meliputi ranah sikap, pengetahuan serta keterampilan. Pembagian dalam ranah taksonomi tersebut sebagai hasil belajar yang dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku pada peserta didik selama proses pembelajaran sampai tercapainya hasil pembelajaran yang dirumuskan ke dalam aspek perilaku. Pada umumnya klasifikasi perilaku hasil belajar yang digunakan berdasarkan taksonomi pada kurikulum Tahun 2013 telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl yang dikelompokkan menjadi **(1)** Sikap yang dikategorikan sebagai perilaku, emosi dan perasaan dalam bersikap, dalam kurikulum Tahun 2013 merupakan urutan pertama dalam perumusan kompetensi lulusan kemudian diikuti dengan rumusan ranah pengetahuan dan keterampilan.

Ranah dalam kurikulum 2013 ini menggunakan pendapat Krathwohl dimana pembentukan sikap dari peserta didik tersebut ditata secara hirarkhis dimulai dari menerima, merespon, menghargai, menghayati, serta mengamalkan (2) Pengetahuan merupakan kapabilitas intelektual ke dalam bentuk pengetahuan berfikir dalam kurikulum Tahun 2013 menggunakan pendapat Anderson, dimana perkembangan kemampuan mental pada peserta didik dimulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi materi yang telah di berikan (3) Keterampilan pada kurikulum Tahun 2013 merupakan keterampilan manual atau motoric dalam melakukan suatu keterampilan yang dilakukan peserta didik yang mengarah kepada pembentukan keterampilan yang ditata sebagai berikut, mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, menyaji serta menciptakan (4) Pembentukan Keterampilan Kongkret pendapat Simpson merupakan suatu pembentukan dengan tahapan persepsi, kesiapan meniru, dan membiasakan suatu proses secara bertahap.



Gambar 5.1 Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan

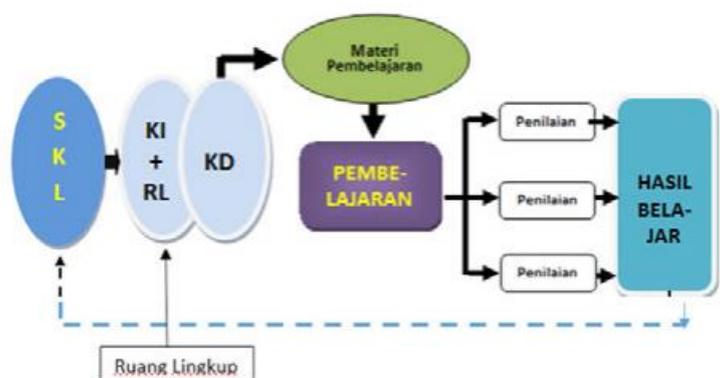
Sumber data: *Kemendikbud 2016*

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- B. Kompetensi Inti sebagai tangga pertama sebagai pencapaian yang di tuju dalam mata pelajaran pada tingkatan kelas tertentu. Penjabaran kompetensi inti setiap mata pelajaran di rumuskan kedalam kompetensi dasar, kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar di capai melalui proses setiap pembelajaran dan penilaian yang dapat dilihat dalam skema berikut



Gambar 5.2 Skema hubungan SKL, K-I,KD, Penilaian dan Hasil belajar

Sumber data: *Kemendikbud 2016*

- C. Penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa tingkat, kompetensi sebagai kriteria pencapaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik setiap tingkatan kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan, tingkat kompetensi terdiri atas 8 jenjang yang harus di capai oleh peserta didik secara bertahap.
- D. Monitoring dan Evaluasi Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, karna kurikulum yang di gunakan pendidikan SMK perlu di monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dan kemudian

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk bahan masukan sebagai penyempurna standar kompetensi lulusan dimasa yang akan datang. Dalam spectrum SMK Tahun 2016 ditetapkan bahwa usaha dalam pencapaian standar kompetensi lulusan yang telah di tetapkan bahwa pendidikan SMK di selenggarakan dalam waktu 3 – 4 Tahun untuk mencapai kompetensi tersebut.

Sedangkan Standar Kompetensi Lulusan menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan pada Nomor 54 Tahun 2013 untuk tingkatan SMK sebagai berikut.

Tabel 5.1 Standar Kompetensi Lulusan SMK

Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung-jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

5.1.1 Sertifikasi Kompetensi Lulusan

Mutu lulusan pendidikan SMK secara ideal di tentukan berdasarkan standar kompetensi kerja sebagai standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Tim Revitalisasi SMK Kemendikbud, 2016) Berdasarkan standar kompetensi ini, dirumuskan suatu sistem pengujian dan sertifikasi. Namun sampai saat ini belum semua program keahlian telah tersedia SKKNI-nya dan beberapa SKKNI yang sudah ada belum di refleksikan ke dalam kurikulum. Saat ini sedang diadakan koordinasi di tingkat kementerian atau lembaga yang membuat SKKNI dalam setiap program keahlian kejuruan.

Namun beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi kerja para lulusan pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia usaha, antaranya melalui penyusunan skema sertifikasi bagi para lulusan pendidikan SMK dengan melibatkan DU-DI maupun pelaksanaan uji kompetensi. Lulusan yang memperoleh sertifikasi ialah para lulusan yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja. Persyaratan ini dapat dimulai dari pembelajaran yang benar di sekolah. Kedua, adanya peralatan uji yang sesuai dengan standar kompetensi di sekolah. Ketiga, sertifikasi kerja yang diberikan oleh BNSP dan Asosiasi profesi. Sebab sertifikasi kerja tersebut karna pada umumnya para lulusan langsung terjun ke dalam dunia kerja sebelum melanjutkan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu para lulusan diwajibkan memiliki sertifikasi kerja yang bersertifikat dengan tujuan membekali para lulusan pendidikan SMK dalam sertifikasi yang diakui dalam dunia kerja. Sehingga para lulusan pendidikan tersebut dapat mampu dengan daya saing yang tinggi, Pada Tahun 2015 Dit. Pembinaan SMK, Kemendikbud dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP-P1). Yang Nantinya setiap calon lulusan SMK akan mengikuti uji kompetensi sertifikasi, kompetensi yang dilaksanakan di LSP-P1 di sekolah masing-masing atau pada LSP-P1 SMK

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terdekat. Jika lulus uji kompetensi peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya.

Pembentukan LSP-P1 dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Pendekatan area: jika di suatu wilayah terdapat beberapa SMK yang belum memiliki LSP-P1 maka akan dikembangkan satu LSP-P1 yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh semua SMK yang ada di wilayah tersebut.
- b. Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki peserta didik >600: saat memiliki peserta didik >600 ada sekitar 4.000 SMK, dengan jumlah total peserta didik sebesar 90% total dari jumlah peserta didik SMK seluruh Indonesia.

5.1.2 Kebijakan Revitalisasi SMK

Revitalisasi SMK yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memiliki konsekuensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMK dan pengelolaan pendidikan khusus dan layanan khusus yang dilakukan oleh pemerintah kota (Tim Revitalisasi Pendidikan SMK Kemendikbud, 2016). Provinsi perlu mempersiapkan diri menerima tanggung jawab pengelolaan SMK dari kota yang dimulai dari aspek perencanaan, pendanaan, pembinaan serta evaluasi yang diberikan. Perpindahan kewenangan lembaga ke pempda kota juga perlu adanya penyesuaian. Dengan ini perlu disusun sistem dan aturan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan SMK yang melewati jalur formal maupun nonformal.

Pemerintah provinsi pun harus siap menghadapi perpindahan pengelolaan sehingga tidak berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Adaptasi perpindahan pengelolaan lembaga pendidikan ini harus juga diikuti dengan komitmen pempda terhadap pengelolaan pendidikan yang terdapat diwilayahnya. Saat ini pemerintah telah melakukan penyelarasan secara periodik dengan melibatkan para lulusan, penyelarasan yang

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mempertemukan sisi pasok (supply) dan sisi permintaan (demand) yang mencakup beberapa bagian yaitu, kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi serta waktu. Ada beberapa strategi untuk memastikan agar kurikulum bisa lebih selaras sehingga para peserta dapat mengembangkan kompetensinya melalui dual system. Dual system ini merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesi yang memadukan sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu sehingga para peserta dapat menyikapi perubahan dinamika tersebut.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka telah ditetapkan Standar kompetensi Lulusan sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki. Dimana upaya tersebut untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang untuk generasi Indonesia di Tahun 2045. Telah ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada kompetensi abad XXI, Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi dalam satuan pendidikan di jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dirumuskan ke dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.

Standar isi menurut kemendikbud Nomor 21 Tahun 2016 merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup tersebut dirumuskan berdasarkan kriteria yang sesuai peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria perkembangan para peserta didik, kualifikasi kompetensi dan penguasaan kompetensi Indonesia. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat. Penerapan kurikulum Tahun 2013 telah berjalan 4

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tahun yang dimana dalam aplikasi berada dalam tingkat yang baik di masyarakat, dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut.



Gambar 5.3 Permasalahan Kurikulum

Sumber data: *Kemendikbud, Dinamika Perkembangan Kurikulum 2013*

Dengan adanya permasalahan yang ada dan yang terjadi pada kurikulum 2013 telah di lakukannya penyempurnaan secara bertahap yang diharapkan dan terlaksanakan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang di tetapkan Dit PSMK Tahun 2016. Pola perbaikan Tahun 2013 ke Tahun 2016. Dimana tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi nasional dan penguasaan kompetensi ke dalam jenjang yang relevan. Berkaitan dengan hal ini, maka yang menjadi masalah ialah bagaimana menyatukan dua komponen antara hard skill dengan soft skill secara bersamaan ke dalam kurikulum pendidikan sehingga mampu menyiapkan para lulusan yang memiliki kemampuan yang siap bekerja di masa yang akan datang. Adapun permasalahan lainnya seperti bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum yang sudah dikembangkan ke dalam program lainnya. Upaya peningkatan yang sudah dilakukan agar memiliki keterkaitan antara link and match dengan memenuhi kebutuhan pasar kerja pada dasarnya tidak dapat di lepaskan dari aspek manajemen pembelajaran. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki misi utama untuk menghasilkan tenaga kerja

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan juga di harapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Namun data pada Tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 7,02 juta orang yang masih menganggur dan presentase terbanyak ialah dari kalangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,84% (Laporan BPS 2016).

Secara tidak langsung fakta tersebut memberitahukan bahwa ada permasalahan dalam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Selain permasalahan keterbatasan ekonomi yang masih miss match antara supply dan demand adapun tingkat pengangguran yang masih belum sesuai dengan harapan. Standar proses pendidikan kejuruan berdasarkan kondisi ideal mengenai proses pembelajaran di SMK yang didasarkan pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yang dituangkan ke dalam visi pengembangan SMK untuk kebijakan revitalisasi lebih lanjut. Untuk merumuskan strategi standar ada beberapa proses kondisi factual yang telah di evaluasi melalui pembelajaran dan hasil penelitian yang relevan, yaitu :

a. Kajian Yuridis

Dalam Permendikbud 2016 Nomor 22 Tahun 2016 standar proses kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan Standar Isi (SI) memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik proses pembelajaran di

sekolah. Pada pembelajaran teori (pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi aspek pengetahuan) dianjurkan menerapkan pendekatan ilmiah (scientific approach), dan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Sementar untuk mengembangkan kemampuan kerja peserta didik, dan kemampuan dalam menghasilkan karya, baik individual maupun kelompok, maka sangat dianjurkan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kerja (workbased learning), dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

b. Kajian Filosofis

Filosofi pendidikan kejuruan merupakan kerangka konseptual yang memberikan arahan untuk memberikan pelayan pendidikan dan pengajaran diperlukan juga tujuan, maksud dan kegunaan pendidikan untuk membangunnya sebuah kerangka (Miller, 1986).

Adapun filosofi tentang kejuruan yang disampaikan oleh Charles Prosser dalam *Vocational Education in Democracy* terkait proses pembelajaran sebagai berikut :

- a. Pendidikan kejuruan akan efisien jika di sediakan lingkungan yang memadai sesuai dimana para lulusan akan bekerja
- b. Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan tugas atau program sesuai yang akan di kerjakan para lulusan
- c. Pendidikan kejuruan akan efektif jika diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan sebenarnya bukan simulative
- d. Pendidikan kejuruan akan efektif bila di berikan tugas yang berlaku di dunia
- e. Latihan yang di lakukan secara berulang

- f. Pendidikan kejuruan akan efektif bila diberikan pembelajaran oleh guru yang professional dan berpengalaman
- g. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila isi program di sinkronkan sesuai dengan kondisi dunia kerja yang terus berkembang
- h. Pendidikan kejuruan akan efektif bila pendidikan kejuruan harus membekalkan keahlian dasar kejuruan, sehingga lulusan akan lebih mudah beradaptasi dengan kompetensi baru sejalan dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja (Camp and Hillison, 1984).

Revitalisasi di SMK ini merupakan visi sebagai proses pendidikan SMK yang harus dijadikan acuan sebagai pengembangan SMK di masa yang akan datang. Revitalisasi pendidikan di SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari supply-driven ke arah demand driven. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan diarahkan pada penerapan sistem ganda (dual-system), yakni belajar teori dan praktik. Maka kurikulum, proses pembelajaran dan sistem pengujinnya harus sesuai dengan kompetensi dunia kerja. Revitalisasi pendidikan secara operasional diwujudkan pada perubahan dan perbaikan berbagai aspek pendidikan, yaitu :

a. Perubahan paradigma pendidikan kejuruan

Dalam buku Barnet Berry Thn 2013 yang berjudul *The Teachers of 2030: Creating a Student-Centered Profession for the 21st Century* telah menggambarkan peran pendidikan pada abad ini. Cara pandang misi pendidikan untuk menyiapkan para peserta didik memasuki profesi tertentu yang sudah menjadi mindset dalam masyarakat perlu di tinggalkan, tugas pendidikan kedepannya harus di ubah perlu adanya

pengembangan diri para peserta didik untuk menciptakan profesinya (Berry, 2013).

b. Peningkatan mutu pembelajaran

Secara operasional revitalisasi pendidikan kejuruan yang terkait dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran kejuruan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan pembelajaran pada abad XXI
Pembelajaran yang mengarahkan para peserta didik untuk menguasai kompetensi para peserta didik dan perlu juga diterapkan konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Peningkatan Kerjasama dengan DU/DI
Proses perlibatan DU/DI diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kejuruan yang meliputi (1) pengembangan kurikulum (2) memberikan pelatihan bagi guru sehingga guru dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sesuai dengan program kejuruan (3) meminta DU/DI mengirimkan mentor sebagai arahan para peserta didik (4) melibatkan DU/DI dalam biaya pendidikan yang meliputi tempat, alat praktik dan biaya lainnya.

c. Penanaman Jiwa Kewirausahaan

Tidak semua lulusan SMK bisa di terima oleh DU/DI yang terkait dengan program keahliannya, maka para peserta didik dapat diharapkan memiliki kemampuan wirausaha namun dapat juga memiliki keterampilan dalam menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, tantangan yang dihadapi SMK adalah bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran Kewirausahaan di sekolah, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kewirausahaan, tetapi juga memperoleh

pengalaman langsung dan keterampilan untuk berwirausaha

d. Pelibatan dunia usaha dan dunia industry

Pada dasarnya pendidikan kejuruan menekankan para pendidikan untuk menyesuaikan permintaan pasar serta link and match antara calon pekerja dan kebutuhan pengusaha. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggara pendidikan kejuruan dapat dilihat dari penyerapan para peserta didik di bidang ahlinya yang telah dipelajari di SMK.

5.2 Standarisasi Penilaian

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tersebut menjadi rujukan ke dalam salah satu penyusunan standar nasional pendidikan. Salah satunya adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang standar pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi aspek seperti sikap, pengetahuan serta keterampilan yang dilakukan oleh para peserta didik. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah dijamin untuk memenuhi prinsip-prinsip penilaian seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian, yang meliputi bahwa (1) bahwa penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan untuk diukur (2) penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas (3) adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan para peserta didik karena berkebutuhan khusus dan tidak membedakan ras (4) terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pembelajaran (5) terbuka, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan (6) menyeluruh, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan beberapa teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan yang dimiliki para peserta didik (7) sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang ada (8) beracu pada kriteria, penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan (9) akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya.

Menurut prinsip-prinsip di atas penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus menggunakan acuan kriteria yang berarti penilaian yang dilakukan berbasis kompetensi. Apabila dibandingkan dengan penilaian lainnya, adapun beberapa keunggulan pada basis kompetensi tersebut seperti, (a) pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non formal yang diadakan secara terpadu, dalam suasana yang menyenangkan, serta memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, pahami dan dikerjakan para peserta didik (b) hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok (norm reference assessment) tetapi dibandingkan dengan kriteria pencapaian kompetensi, standar pencapaian, dan level pencapaian nasional dalam rangka membantu para peserta didik untuk mencapai apa yang ingin dicapai (c) pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara, agar kemampuan para peserta didik dapat terdeteksi secara lengkap (d) perlu adanya penuntutan pada siswa agar para peserta didik dapat mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengarahkan semua potensi dalam menanggapi, mengatasi semua masalah yang dihadapi dengan cara sendiri, bukan hanya sekedar melatih para peserta didik memilih jawaban yang tersedia (e) menentukan ada atau tidaknya kemajuan belajar dan perlu tindakan bantuan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan berdasarkan fakta dan bukti yang cukup akurat.

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penilaian berkala atau periodic merupakan penilaian yang dilakukan secara berkala, tidak terus menerus, dan hanya pada waktu tertentu misalnya seperti ujian blok (merupakan ujian semester atau ujian akhir) dan uji kompetensi. Hal-hal yang harus di perhatikan dalam penilaian berkala ini adalah :

- (1) bahan yang diujikan dalam penilaian berkala harus representatif atau mewakili materi presentasi yang di ajarkan
- (2) penilaian berkala merupakan akumulasi selektif dari penilaian kelas
- (3) kualitas soal yang digunakan dalam penilaian berkala harus baik atau di mengerti
- (4) hasil penilaian berkala harus berlaku dan diakui pada tingkat regional atau nasional
- (5) peserta ujian dalam penilaian berkala harus memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan karakteristik ujian berkala yang telah di tempuh.

Penilaian perkemendibud Nomor 3 Tahun 2017 tentang standarisasi pendidikan menjelaskan bahwa ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi para peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan dari para peserta didik. Menurut Stiggins dan Chappuis Tahun 2012 ada beberapa kunci sukses dalam melakukan penilaian yang melibatkan siswa, yaitu :

- (a) setelah diberi tahu jawaban yang benar terhadap tugas yang diberikan, para peserta didik diminta untuk mengoreksi pekerjaannya yang telah selesai
- (b) guru selalu mengingatkan tentang pentingnya kualitas suatu karya
- (c) guru memberikan contoh dalam memberikan skor hasil karya peserta didik dengan akurat, maka guru dianjurkan untuk memberikan penskoran terhadap karya

- (d) para peserta dilatih untuk memberikan skor terhadap hasil karyanya sendiri
- (e) guru harus benar-benar memperhatikan pencapaian belajar para peserta didik.

Dengan menerapkan beberapa kunci sukses tersebut menurut Stiggins dan Chappuis kemungkinan besar penilaian tidak hanya sekedar untuk mengetahui kemajuan dan pencapaian belajar peserta didik, tetapi juga mampu mendorong para peserta didik untuk jujur, bertanggung jawab, bercitra rasa tinggi, dan paham dengan kompetensi yang dipelajari, terampil menilai karyanya sendiri, menghargai karya orang lain, serta mengetahui kemajuan dari hasil belajar peserta didik.

5.2.1 Perkembangan Kurikulum SMK

Pengembangan kurikulum menjadi strategi untuk pencapaian pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan belajar yang dapat menghasilkan lulusan dengan daya saing yang tinggi, maka perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran (Jalinus dkk., 2017). Pendidikan mengupayakan agar hasil yang diperoleh siswa ketika sekolah dapat memberikan kemampuan yang kompeten di bidangnya (Kemenker, 2017) mengatakan kurikulum SMK belum sesuai dengan dunia industry. Dalam pengembangan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kerja industry diharapkan para lulusan dari sekolah pendidikan SMK dapat bekerja. Guru disekolah tidak lagi sebagai penyampai materi, melainkan bertindak lebih sebagai panduan, nasihat, motivator, fasilitator. Kegiatan pembelajaran di sekolah menengah kejuruan lebih banyak belajar praktik, belajar praktik dapat terlaksana dengan optimal melalui penggunaan model pembelajaran yang tepat dimana pengembangan model pembelajaran harus bisa memfasilitasi siswa untuk menguasai pengajaran bahan dan memberikan pengetahuan serta implementasi materi pengajaran (Jalinus dkk., 2017). Praktik pembelajaran dalam pendidikan SMK adalah

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penyediaan pembelajaran bagi siswa untuk memperoleh kemampuan operasional mesin, keahlian pemrograman, atau keahlian pemeliharaan.

Kurikulum pada SMK akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Sekolah dapat menerima kurikulum baru, namun untuk melaksanakan kegiatan praktikum khususnya di sekolah masih terdapatnya kendala sarana dan prasarana praktikum. SMK dapat dikembangkan sesuai dengan yang dibutuhkan, hal tersebut menjadi salah satu sebab para lulusan SMK sulit untuk memasuki dunia kerja yang dibutuhkan, untuk mewujudkan kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan prakerin ke dunia kerja demi mendapatkan skill dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya.

Perkembangan SMK sejalan dengan perubahan kehidupan kebangsaan, salah satu diantaranya ialah pendidikan nasional di Indonesia yang mengalami perluasan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta agar menjadi manusia yang demokratis serta bertanggung jawab, untuk mencapai tujuan pendidikan disusun sebuah kurikulum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I Pasal 1 butir 19 yang menjelaskan bahwa kurikulum ialah sebagai perangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.



Gambar 5.4 Perkembangan Kurikulum

Sumber data: *Kemendikbud* 2013

Seperti gambar diatas bahwa kurikulum telah mengalami perubahan dari tahun 1947, 1964,1968,1973,1975,1984,1994,1997,2004,2006,2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan iptek dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan setiap tahunnya dengan perubahan yang terjadi dimasyarakat, kurikulum nasional tersebut di rancang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang memiliki perbedaan dari pokok tujuan pendidikan untuk merealisasikannya.

Adanya arahan presiden untuk mewujudkan Visi Indonesia di Tahun 2020-2024 adalah pendidikan kejuruan, SMK di daerah-daerah dihubungkan denga industry agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan dan siap akan hal yang baru. Hal tersebut menginspirasi Direktorat Jendral Pendidikan SMK 2020-2024 sebagai rencana strategi yang berkesinambungan dari arah kebijakan pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang Tahun 2005-2024, dimana pembangunan pendidikan SMK di arahkan pada daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing untuk menghadapi persaingan global ke depannya.

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



Gambar 5.5 Pembangunan Pendidikan

Sumber data: *Kemendikbud 2015-2019*

Revitalisasi pendidikan SMK ke depan tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun jumlahnya, namun banyaknya yang di dominasi dari SMK di Tahun 2016 sampai 2019 yaitu sebagai berikut



Gambar 5.6 Perkembangan SMK Selama 4 Tahun Terakhir

Sumber data: *Badan Pusat Statistik 2016*

Populasi di Indonesia terbanyak terdapat di pulau Jawa dan Sumatra dengan proporsi SMK, kedua pulau tersebut mencapai 78%. Tingginya SMK pada era tersebut dikarenakan tingginya jumlah pertumbuhan lapangan pekerjaan dan populasi demografisnya. Jika dilihat pada grafik

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

diatas jumlah grafik di pulau Jawa sebesar 57,2%, pulau Sumatera sebesar 20,9%, Sulawesi sebesar 8,2%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 8,2%, Kalimantan sebesar 5,1%, Maluku sebesar 1,7% dan Papua sebesar 1,4%.



Gambar 5.7 Jumlah SMK di Indonesia

Sumber Data: Statistika Kemendikbud 2019

SMK di Indonesia memiliki 146 kompetensi dimana dari 146 tersebut sekitar 60% dari proporsi kompetensi diisi hanya oleh 10 proporsi utama. Kompetensi-kompetensi tersebut dimiliki oleh mayoritas SMK di Indonesia karena permintaan industry akan kompetensi yang dinilai cukup besar.

Fokusnya dunia pendidikan saat ini ialah memberikan keterampilan bagi generasi muda khususnya menyambut persaingan yang semakin erat.

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pendidikan dan pelatihan SMK akan semakin di perkuat seiring bergesernya strategi pembangunan, kursus dan pelatihan merupakan bagian dari pendidikan nonformal dimana dalam pasal 26 ayat (5) UU Sisdiknas dinyatakan bahwa kursus dan pelatihan memerlukan bekal pengetahuan keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan kjenjang yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan memiliki peran yang tinggi dan fungsi strategi dalam peningkatan sumberdaya manusia melalui kecakapan hidup. Muara dari program kursus dan pelatihan adalah peningkatan kompetensi seseorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dibidang profesinya yang ditandai dengan sertifikat setiap lulusan. Hal ini di utarakan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) 2019 di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat). Untuk program kedepan dalam rangka pengembangan kursus dan pelatihan rekrutmen peserta didik dilakukan sesuai dengan kemauan dan potensi diri masing-masing dan memiliki syarat bahwa peserta didik usia sekolah namun tidak diperkenankan yang dibawah 21 tahun. Proses pelaksanaan kursus dan latihan dibagi menjadi 2 komponen yaitu 1) pendidikan kecakapan kerja yang kurikulumnya berbasis kompetensi dan harus bekerjasama dengan DUDI; 2) pendidikan kecakapan wirausaha yang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan usaha dan manajemen usaha kecil bekerjasama dengan UMKM.

Pada tahun 2014 program PKK dan PKW merupakan bagian dari program pendidikan kecakapan kerja untuk saat ini sudah dilakukan berbagai inovasi, diantaranya mempercepat proses pengajuan bantuan melalui e-proposal, pembelajaran menggunakan sistem massive open online course dan blended learning system, bahan ajar yang menggunakan e-book, jenis-jenis keterampilan yang diajarkan mengangkat potensi/kearifan local dan menambahkan materi digital marketing pada pembelajaran yang

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mendukung industry 4.0. Dibawah ini Pencapaian saran program PKK dan PKW dari tahun 2015-2019 :



Grafik 5.1 Program PKK dan PKW Tahun 2015-2019

Sumber data: *Pusdiklat 2019*

Pada tahun 2019 pendidikan SMK melalui kursus dan pelatihan telah melakukan beberapa pencapaian kinerjanya sesuai dengan arahan Presiden, antara lain:

- 1) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja sebanyak 290.783 orang
- 2) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kewirausahaan berwirausaha sebanyak 201.599 orang
- 3) Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti magang pada DUDI sebanyak 5.030 orang
- 4) Standar kompetensi lulusan sebanyak 74
- 5) Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang telah terbentuk sebanyak 743 tempat
- 6) Jumlah peserta didik yang telah memperoleh bantuan uji kompetensi sebanyak 369.498 orang
- 7) Jumlah master penguji untuk kursus dan pelatihan sebanyak 666 orang

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



Gambar 5.8 Capaian Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2019

Sumber Data: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kemdikbud
Tahun 2019

Selain pencapaian diatas terdapat beberapa pencapaian kinerja yang dimulai dari 2015-2019 sebagai berikut:

- 1) 2660 instruktur yang diberikan peningkatan kompetensi infrastruktur di bidang keterampilan
- 2) 286 lembaga yang telah melakukan kerjasama dengan DUDI/SMK/LKP/BLK/Dinas Pariwisata/Dinas Perindustrian dan lembaga lainnya.
- 3) 115 sekolah telah mendapatkan bantuan penguatan pendidikan kecakapan hidup (PKH) dan pendidikan kewirausahaan (PPK)
- 4) Telah mendapat inovasi 20 jenis pelakaran keterampilan pada empat bidang yaitu pariwisata, mesin dan teknologi, seni dan budaya, pertanian
- 5) Melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan pendamping usaha
- 6) Telah melakukan pengembangan kewirausahaan

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- 7) Telah melakukan kerjasama dengan kemenaker dan BNSP dalam penyusunan standar kompetensi kerja khusus bagi penyandang distabilitas

5.3 Babak Baru Dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan SMK Dalam Kerjasama Indonesia-Jerman

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman mempererat hubungan bilateral kedua Negara melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama dalam pendidikan SMK, menteri PPN/Kepala Bappenas dan federal minister for economic cooperation and development Gerd Muller menandatangani Declaration of intent on strengthening and Deeping of the Partnership in the field of technical and vocational education and training ditujukan untuk mendorong implementasi German Dual Approach to TVET yang mengedepankan keterlibatan pihak swasta dan industry dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan teknik dan SMK di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkeahlian dan sesuai dengan kebutuhan industry serta pembangunan nasional (Bambang, 2017).

Program berkelanjutan pengembangan ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan diimplementasikan melalui kerjasama teknis dan kerjasama keuangan. Dimana dalam program tersebut memiliki misi utama yaitu memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan kejuruan mendapatkan dukungan sehingga berkembangnya program ini mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensinya sebagai meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Banyak nya program SED-TVET yang mendorong konsep link and match yang menghubungkan sisi ketersediaan dan permintaan tenaga kerja yang kompeten, sehingga dapat merespon kebutuhan yang mendesak terkait dengan era persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Beberapa hal yang menggambarkan sebagai upaya untuk memperbaiki metode pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang lebih berkualitas sebagai kordinasi intensif antar semua sebagai pemangku kepentingan yang akan meminimalisir kesenjangan harapan sebab proses reformasi pendidikan dan pelatihan kejuruan tersebut memerlukan komitmen dan keterlibatan sektor swasta, rencana pengembangan sekolah menjadi alat yang efektif untuk pengelolaan kelembagaan pendidikan dan kejuruan untuk replikasi pendekatan teaching factory dan melakukan tindak lanjut atas regulasi yang disusun terkait dengan pendekatan tersebut (GIZ).

Declaration of intent on strengthening and Deeping of the Partnership in the field of technical and vocational education and training memiliki enam point penting, sebagai berikut :

- a) Dukungan untuk mendorong reformasi sistem pendidikan dan pelatihan SMK terutama dalam hal meningkatkan keterlibatan intensif pihak swasta
- b) Dukungan pendidikan dan pelatihan SMK untuk peningkatan pekerjaan dan pembangunan sektor unggul dan daerah
- c) Dukungan dalam pengembangan sistem pendidikan SMK berkelanjutan dari pendidikan menengah ke jenjang pendidikan tinggi
- d) Dukungan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pendidikan SMK, dan asesor, terutama melalui pelatihan industry.
- e) Dukungan untuk membangun hubungan kerjasama yang erat antara pendidika SMK dengan sektor swasta Indonesia-Jerman melalui pengembangan pendidikan sistem ganda
- f) Peningkatan kualitas dan cakupan dalam pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kurikulum pendidikan SMK bekerjasama dengan pihak swasta, dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.

Dapat dilihat dari data Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementrian pendidikan dan kebudayaa di Indonesia

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terdapat 13.167 SMK yang di dukung 287.717 guru kejuruan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut kesepakatan declaration of intent Indonesia-Jerman akan menghelat High Level Round Table on Technical and Vocational Education and Training. Dari sisi penambahan kuantitas lulusan pendidikan SMK, pemerintah Indonesia akan mendorong penambahan jumlah sekolah, dan memprioritaskan peningkatan kompetensi guru serta kurikulum serta penyediaan balai latihan yang memadai (Bappenas, 2017).

Pada saat ini perubahan perkembangan teknologi berdampak terhadap pendidikan kejuruan, pada abad XXI merupakan abad yang penuh dengan perubahan, konteks pembelajaran menurut triling dan fadel (2009) kompetensi abad pada XXI ini meliputi : 1) pembelajaran dan keterampilan inovasi dalam penguasaan pengetahuan, berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi saling berkaitan serta kreatifitas dan inovasi 2) keterampilan literasi digital seperti literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT 3) karir dan kecakapan pada hidup yang terdiri dari fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktifitas, akuntabilitas, kepemimpinan serta tanggung jawab. Kompetensi pada abad tersebut menurut sudira (2018) sejalan dengan menjelaskan pekerjaan yang datang pada abad XXI dimana pada abad tersebut membutuhkan skill dalam memecahkan masalah secara kolaboratif seperti lintas disiplin ilmu, lintas bidang, lintas ruang, dan waktu, selain penjelasan di atas perlu adanya kerjasama untuk berkolaborasi, komunikasi efektif, kreativitas, kemampuan berfikir kritis, pengasaan terhadap media dan teknologi informasi. Dan perlu adanya inovasi sebab sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan pembelajaran TVET untuk saat ini dan masa depan. Untuk menghadapi abad XXI tersebut maka diharuskan memiliki skill kompetensi dan pengetahuan yang perlu diterapkan di perguruan tinggi maupun dunia kerja. Serta pembelajaran pada abad XXI ini menyesuaikan perubahan era industry 4.0 yang berbasis sains, teknologi dan rekayasa.

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

5.3.1 Tantangan Dan Peluang Revolusi Industri 4.0 Pada Pendidikan SMK

Hadirnya revolusi industry 4.0 ini memunculkan berbagai tantangan dan tuntutan yang tidak mungkin dapat dihindarkan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut pendidikan kejuruan harus terus dikembangkan secara dinamis berinovasi dan kreasi. Untung menghadapi tantangan industry 4.0 yang semakin kompleks, wolter mengidentifikasi tantangan industry yang meliputi 1) masalah keamanan dalam teknologi informasi 2) andalan dan stabilitas produksi 3) kurangnya keterampilan yang memadai 4) tidak adanya perubahan dari pemangku kepentingan 5) hilangnya pekerjaan karena adanya perubahan dari otomatisasi ke teknologi (Sung, 2017)

Untuk menghadapi tantangan transformasi pendidikan 4.0 pada pendidikan kejuruan perlu adanya langkah-langkah yang harus di perhatikan. Tentunya langkah-langkah tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan pada pendidikan ini. Untuk menjawab tantangan tersebut menurut Bukit (2014) pendidikan kejuruan harus memiliki karakteristik yang meliputi: 1) berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja 2) adanya kebutuhan nyata dilapangan 3) fokus terhadap kurikulum 4) sebagai tolak ukur keberhasilan 5) kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja 6) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai 7) serta perlunya dukungan dari masyarakat.

Multi kompetensi dan pengetahuan di abad tersebut yang dibutuhkan harus memiliki integrasi ke dalam elemen pendidikan kejuruan. Kebijakan pemerintah untuk revitalisasi pendidikan kejuruan Indonesia harus mencakup *Chronosystem* pendidikan kejuruan dalam era industry seperti 1) adanya sistem pembelajaran 2) satuan pendidikan 3) peserta didikan dan 4) pendidikan dan tenaga pendidikan yang di butuhkan (Muhamad, 2018)

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



Gambar 5.9 Chronosystem pendidikan kejuruan era industry 4.0

Sumber data: *Jurnal Prof. Dr. H. Muhammad Yahya, M.Kes., M.Eng. 2018*

Berdasarkan gambar 2 pada komponen sistem pembelajaran, satuan pendidikan, peserta didik, satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kerja kependidikan saling integrasi dalam suatu sistem pendidikan kejuruan, selaras dan saling keterkaitan dalam berperan untuk menyongsong perubahan dalam menghasilkan SDM yang siap kerja.

5.3.2 Pembelajaran Revolusi Industri Pendidikan Kejuruan

Transformasi pada era digital perlu untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia sama halnya dengan percepatan dalam adaptasi revolusi di lingkungan pendidikan kejuruan sangat diperlukan terutama dalam pembelajaran yang mencakup kompetensi pada abad XXI dan sejalan dengan peran TVET sebagai pendidikan dan pelatihan yang tujuannya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Proses pembelajaran saat ini sudah bukan hal yang baru untuk dilakukannya di era milenial. Proses pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dan menggunakan teknologi dengan jangkauan yang tidak terbatas mampu melewati jarak, ruang dan waktu. Menurut Menrisdikti Muhamad Nasir (2018) pada peningkatan mutu pendidikan SMK perlu dirancangnya aktivitas utama revitalisasi pendidikan tinggi SMK melalui aktivitas 1) revisi kurikulum 2) penguatan teaching

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

factory 3) sertifikasi lulusan SMK 4) menyediakan guru SMK yang produktif.

Adanya solusi yang diberikan oleh Didin Wahidin Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa kemenristekdikti (2018) dalam penguasaan kompetensi perlu adanya gerakan literasi baru seperti literasi data, teknologi dan manusia. Ketiga keterampilan kompetensi tersebut diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan pada pendidikan SMK. Adaptasi gerakan literasi baru dapat diintegrasikan dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran sebagai respon yang perlu dikembangkan untuk pendidikan kejuruan di abad XXI. Ditengah perkembangan teknologi yang super cepat di bidang pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa, munculnya massive open online course (MOOC) yang mengubah cara pandang pendidik diseluruh dunia.

MOOC tersebut juga sudah dikembangkan di Indonesia, dimana dalam pembelajaran dapat dilakukan secara online yang terbuka untuk siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Muhamad Nasir (2018) memberikan solusi pembelajaran dengan cara blended e-learning yakni face to face, blended dan online e-learning. Melalui solusi tersebut maka dapat dilakukannya pembelajaran secara elektronik. Namun e-learning yang diterapkan dalam pendidikan tersebut tentunya harus matching dengan kompetensi yang ada dan tertentu sehingga tidak semua kompetensi pembelajaran dapat diterapkan menggunakan e-learning. Selain itu e-learning juga dapat digunakan saat peserta didik melakukan praktin ditempat kerja sehingga peserta didik dapat belajar dan komunikasi melalui e-learning. Sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapan saja. Dengan adanya e-learning tersebut dapat memberikan akses bagi masyarakat terpencil untuk bisa terhubung ke lembaga pendidikan dengan jarak ratusan kilometer jauhnya, hal tersebut dengan adanya e-learning secara tidak langsung masyarakat sangat terbantu dengan jarak yang tidak memadai untuk langsung datang ke lembaga pendidikan.

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

5.3.3 Analisis Pengaruh Kerjasama Indonesia-Jerman Terkait Standarisasi Pendidikan

Adanya keinginan menteri pendidikan untuk menjadikan pendidikan SMK di Indonesia lebih maju dengan menggunakan pengembangan role model dari sejumlah Negara salah satunya Jerman. Selama ini hubungan institusi pendidikan dan industry sudah terjalin dengan adanya program link and match, para peserta pendidikan SMK dilatih selama masa sekolah proyeksi agar dapat bekerja dan beradaptasi. Meskipun dinilai masih adanya kekurangan dalam mengatasi dunia pendidikan tersebut namun tujuan program menurut menteri pendidikan sudah cukup baik. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki daya saing melalui peningkatan standar pendidikan SMK dengan Jerman dalam kerjasama pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan standar pendidikan Jerman. Ada pun poin kerjasama antara pemerintah dengan Ekonomi Indonesia Jerman (Ekonid) mencakup empat aspek yaitu Pertama, penguatan keterlibatan perusahaan dan dunia industry dalam mengembangkan pendidikan dan pelatihan SMK melalui berbagai inisiatif bersama kementerian dan ekonid. Kedua, pendidikan kejuruan sistem ganda sesuai dengan standar Jerman untuk jurusan mekanik selama 2,5 tahun yang merupakan pertama kali dilaksanakan bersama sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Ketiga, peningkatan terhadap kualifikasi guru sekolah SMK dan pelatihan tempat kerja di perusahaan melalui training of trainers berdasarkan standar Jerman. Keempat, adanya dukungan program latihan SMK (pemagangan) bagi sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia.

Dalam kurung waktu 3 Tahun adanya beberapa penurunan pengangguran pada para lulusan pendidikan SMK di Indonesia setelah berlanjutnya hubungan kerjasama dengan Jerman. Pada Tahun 2017 sebesar 9,27% terdapat pengangguran pada para lulusan pendidikan SMK pada tahun 2019 turun menjadi 8,63%. Dalam arti ada beberapa persen penurunan angka pengangguran terhadap para lulusan pendidikan SMK, Sedangkan

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

para lulusan yang bekerja pada Tahun 2017 13,53% hingga tahun 2019 sebesar 14,63% adanya peningkatan dalam lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Pemerintah berharap dengan kerjasama tersebut kedua institusi bisa membangun skema berkelanjutan untuk memperbanyak porsi pelatihan praktik bagi para lulusan SMK di perusahaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan SMK SMK di Indonesia. Pendidikan dan pelatihan SMK yang di lakukan Indonesia selama ini sebagian besar dilakukan melalui instansi yang didanai melalui APBN/APBD, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak mudah diperlukannya perubahan mindset banyak pihak (stakeholders) yang terkait, terutama yang berhubungan dengan sistem pendekatan dan pandangan atas pendidikan dan pelatihan SMK yang selama ini telah berlangsung di Indonesia.

Adanya tantangan utama dalam hal tersebut adalah mampu mengundang pihak swasta untuk terlibat secara aktif, pada umumnya swasta beranggapan bahwa pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan bagian dari pendidikan formal yang bertanggung jawab tunggal dan mutlak ada pada pemerintahan/kementrian pendidikan dan kebudayaan. Anggaran pemerintah APBN/APBD juga sebagai salah satu tantangan besar dalam mengadaptasi sistem ganda SMK Jerman di Indonesia secara nasional. Kondisi ideal dalam menghadapi ini Jerman tentu memberikan landasan hukum yang kuat melalui sebuah Undang-Undang dengan mandat dan wewenang yang jelas dengan berbagai peraturan dan perundangan yang sesuai.

Terkait dengan hal tersebut KBRI Berlin terus mendukung upaya adaptasi sistem pendidikan dan pelatihan SMK Jerman ke Indonesia melakukan pemahaman komprehensif atas pengembangan kerjasama pendidikan dan pelatihan pendidikan SMK dengan mengundang pihak-pihak terkait yang memiliki pemahaman yang sama tentang bentuk dan format pendidikan dan pelatihan SMK yang tepat bagi Indonesia, secara

Nafa Diantika Destiari, 2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

khusus upaya adaptasi sistem ganda SMK Jerman di Indonesia perlu menjadi sebuah gerakan nasional.

Nafa Diantika Destiari, 2021

***IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-JERMAN TERKAIT PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN SMK DI INDONESIA PERIODE 2017-2019***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]